

# Model Pemberdayaan Usaha Syariah (Pesantren dan Non Pesantren)

**Ir. Putu Rahwidhiyasa, MBA**  
**Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah**

Disampaikan pada acara Sharia Economic Forum FESyar 2024  
Minggu, 15 September 2024



# OUTLINE



Ekonomi  
Syariah

**KNEKS**  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

1 KNEKS dan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia

2 Pengembangan Bisnis Pesantren

3 **Purwarupa Platform Digital Business Matching**

4 Ekosistem Bisnis Syariah berbasis Pesantren



1

# KNEKS dan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia



1

"Pesantren di seluruh pelosok negeri **harus terus kita dorong** untuk **menggalakkan kegiatan** dan pembelajaran **di bidang ekonomi dan keuangan syariah** dalam kurikulumnya." - Indonesia *Sharia Economic Festival 2022* di JCC Senayan, 6 Oktober 2022

2

"Pesantren diharapkan menjadi **pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat** yang berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional baik **melalui pengembangan bidang keuangan** seperti program Bank Wakaf Mikro, BMT, atau usaha ultra mikro lainnya maupun sektor rill." - Peringatan HSN 2021, Jakarta

3

"**Lokomotif penggerak ekonomi syariah** antara lain adalah **lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non-bank.**" - Pengukuhan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Guru Besar Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara, 2018

4

"Pesantren tidak hanya melahirkan orang paham agama tapi juga bisa memakmurkan bumi. **Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat** dengan melahirkan santripreneur. Hal ini tujuannya untuk memakmurkan bumi guna mensejahterakan Indonesia." **Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah** (Sakinah) yang ditandai dengan peluncuran **Gerakan Santri Menabung**, Depok, 31 Oktober 2022

5

Literasi Keuangan Syariah menjadi **50 %**. - Rapat Pleno KNEKS, 2022







## Tugas KNEKS

“Mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional”

Ruang Lingkup  
Ekonomi dan  
Keuangan  
Syariah

Pengembangan  
Industri Produk Halal

Pengembangan  
Industri Keuangan  
Syariah

Pengembangan Dana  
Sosial Syariah

Pengembangan dan  
Perluasan Kegiatan  
Usaha Syariah

1

Pemberian rekomendasi kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah

2

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah

3

Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah

4

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah

Penyelenggaraan Fungsi KNEKS sebagaimana dimaksud dalam PP 28 Tahun 2020 Pasal 4

## SUPPLY

### COMMERCIAL FINANCE



Investor  
Global



Dana  
Pemerintah



Pasar Modal  
Syariah



Perbankan  
Syariah



Investor  
Institusi



Investor  
Ritel



IKNB Syariah

### SOCIAL FINANCE



- Wakif
- Muzakki
- Donatur



- BMT
- BWM



- Organisasi  
Pengelola ZIS
- Nadzir Wakaf



### INDUSTRI HALAL



Kawasan Industri



Laboratorium



Pelabuhan



Lainnya

### INFRASTRUKTUR INDUSTRI



Input



Produksi



Distribusi



Penjualan &  
Pemasaran

Makanan &  
Minuman

Modest  
Fashion

Pariwisata

Farmasi &  
Kosmetik

Media &  
Rekreasi

Bisnis  
Syariah

### KOMUNITAS



- Lembaga Islam
- Ormas
- Pesantren



Masjid



- Asosiasi
- Kelompok Usaha  
Rakyat

## DEMAND

PASAR  
GLOBAL



PASAR

PASAR  
DOMEST



### SUMBER DAYA MANUSIA



Institusi Pendidikan  
Sertifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi

### RISET & PENGEMBANGAN



Halal science  
Keuangan Syariah



### REGULASI

Peraturan  
Standards  
Fatwa



### BRANDING

Sosialisasi  
Promosi



### TEKNOLOGI DIGITAL

Big Data, Blockchain  
Internet of Things  
Artificial Intelligence, dll



### AWARENESS & PERLINDUNGAN KONSUMEN

## INFRASTRUKTUR EKOSISTEM

**DinarStandard**  
**#3 Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023** (#11 di 2018)

**crescent rating**  
**#1 Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 & 2024** (#2 di 2022)

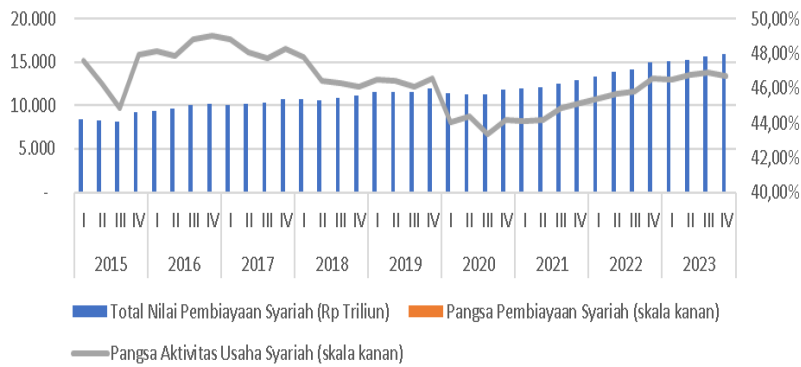
**REFINITIV**  
**#3 Islamic Finance Development Indicator (IFDI)** (#10 di 2018)

**#3 Global Islamic Finance Report (GIFR)** (#6 di 2018)

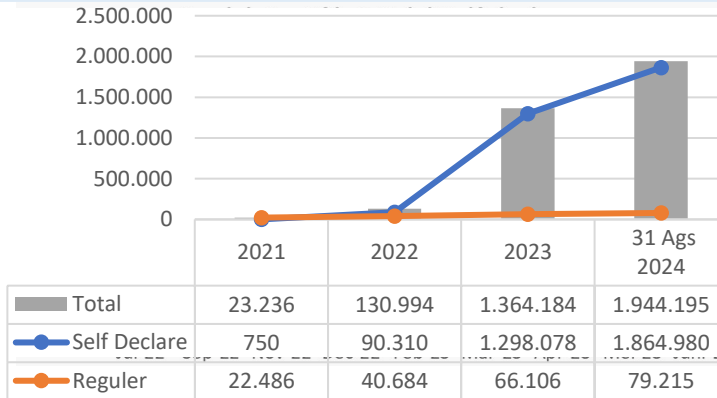
**DinarStandard**  
**#3 Global Islamic Fintech Report 2023** (#4 di 2021)

**#28,01% Indeks Literasi Ekonomi Syariah (BI) 2023** (#23,3% di 2022)

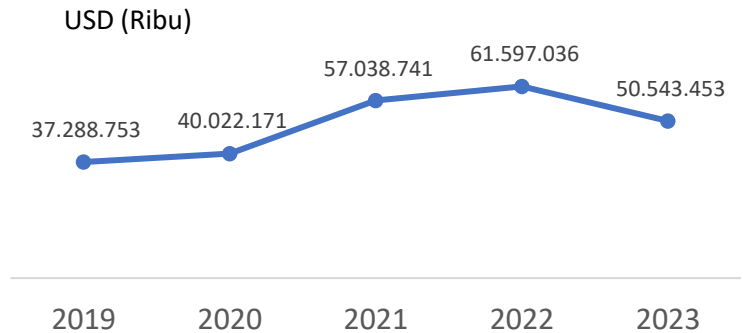
**Kontribusi Aktivitas Usaha Syariah terhadap PDB Nasional pada Desember 2023 adalah 46,72% (± Rp9.761 Triliun), tumbuh 0,19% YoY**



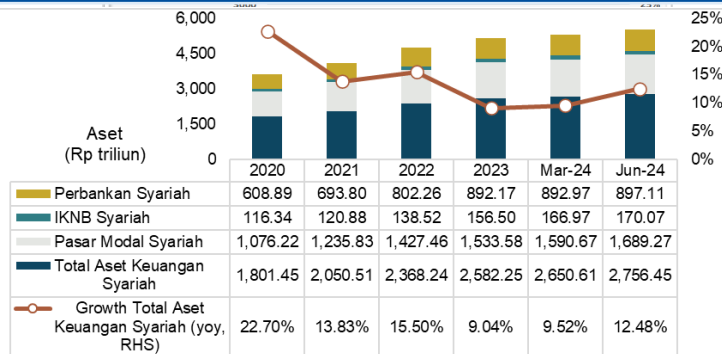
**Sertifikasi Halal bertambah setiap tahunnya, dengan total 1.944.195 SH terbit per 31 Agustus 2024, tumbuh 43% dari 2023**



**Total Ekspor Produk Halal 2023 mencapai USD 50,5 Miliar, dalam 5 tahun terakhir meningkat 10,95%**

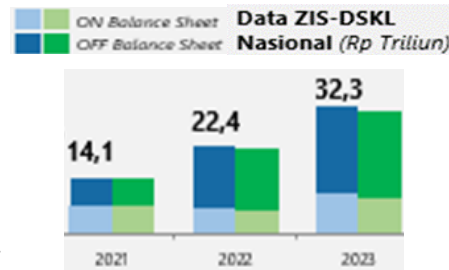
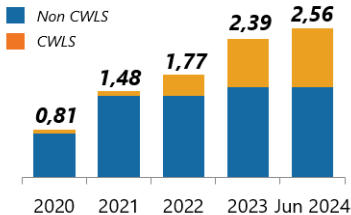


**Total Aset Keuangan Syariah Juni 2024 Rp2.756,45 Triliun; tumbuh 12,48% (YoY)**



**Wakaf Uang Tumbuh mencapai 2,56 Triliun; ZIS – DSKL mencapai 32,3 Triliun**

**Akumulasi Aset Wakaf Uang (Rp Triliun)**



**Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah telah Terbentuk di 30 Provinsi**

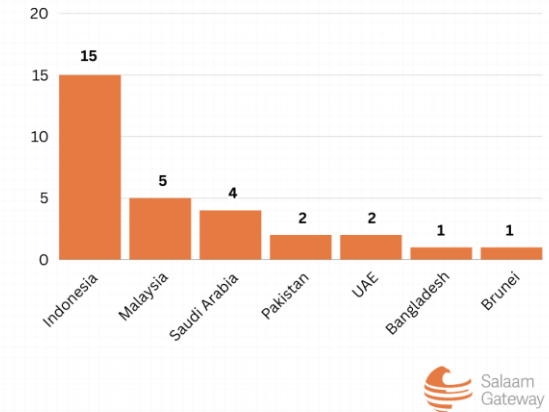




## Top 30 OIC Halal Products Companies 2023

Salaam Gateway dan Dinar Standard menempatkan Indonesia di posisi pertama sebagai negara yang memiliki produsen halal terbesar diantara **57** negara-negara OKI. 30 diantara perusahaan global, **15** berasal dari Indonesia. Penilaian berdasarkan *revenue*, *halal market*, dan *export to OIC countries*.

Top 30 OIC Halal Products Companies by Country..



### HALAL FOOD (6)



### PHARMACEUTICALS (5)



### COSMETICS (4)



## Top 5 negara dalam peringkat SGIER 2023

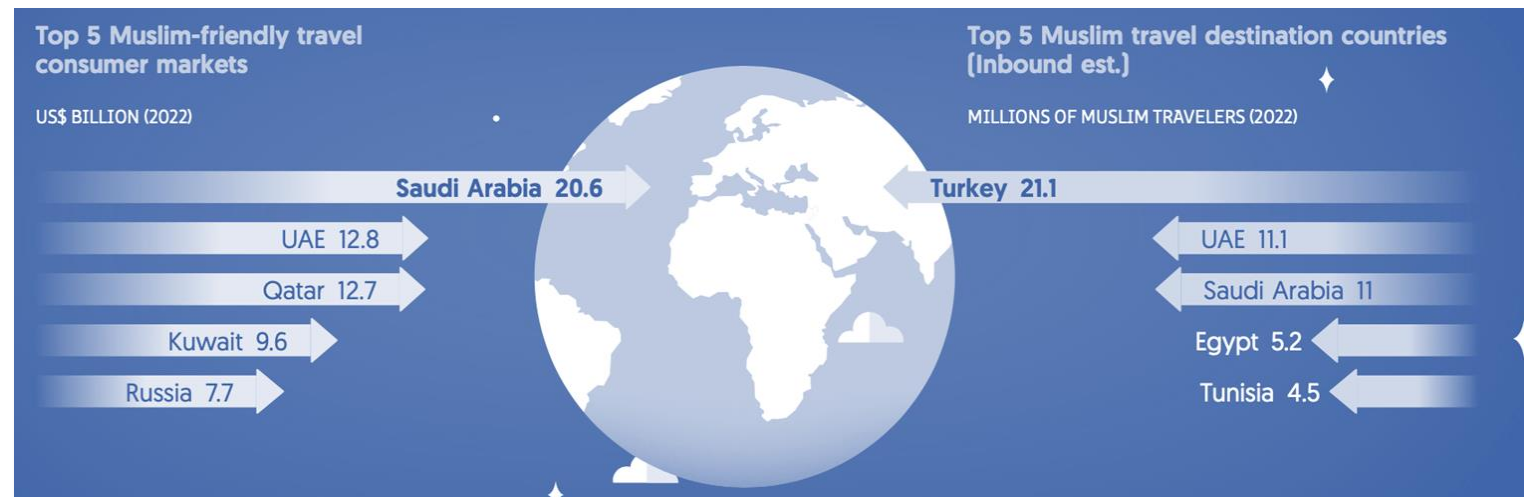
	Weightage	30%	30%	10%	10%	10%	10%	
	GIEI	Islamic Finance	Halal Food	Muslim-Friendly Travel	Modest Fashion	Media and Recreation	Pharmaceuticals and Cosmetics	
1	Malaysia	193.2	408.7	128.0	99.4	73.6	74.4	73.9
2	Saudi Arabia	93.6	194.9	48.5	99.7	34.3	37.5	34.3
3	Indonesia	80.1	93.2	94.4	60.7	66.3	52.4	58.6
4	United Arab Emirates	79.8	115.7	59.2	136.2	51.3	44.5	41.3
5	Bahrain	75.0	125.1	55.0	88.1	33.4	49.6	38.5

Pendekatan penilain di SGIER ditentukan oleh:

- Keuangan/Investasi
- Peraturan/pedoman
- Literasi/kesadaran
- Sosial/budaya
- Inovasi/teknologi

- Nilai pengeluaran wisatawan muslim global pada tahun 2022 sebesar **USD 133 Miliar**, naik **17%** dari tahun sebelumnya seiring dengan pemulihan pasca COVID 19.
- Diperkirakan di tahun 2027 mengalami kenaikan sampai **USD 174 Miliar** dengan pertumbuhan **5,5% (CAGR)**.
- Nilai investasi terkait PRM meningkat signifikan dari **USD 7,8 juta** (2021/2022) menjadi **USD 3,4 Miliar** (2022/2023)

## Investasi & Pengeluaran Wisatawan





## 2 Pengembangan Bisnis Pesantren



## JAWA TIMUR

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan One Pesantren One Product.
- One Pesantren One Product dimulai tahun 2019 dengan target 1.000 pesantren setiap tahun selama 5 tahun yang memiliki produk yang tersebar di 627 Kecamatan di Jawa Barat.
- Sasaran: pesantren atau koperasi pesantren yang memiliki potensi bisnis atau bisnis yang sudah berjalan.
- Info terupdate:
  - ✓ Realisasi 2019-2023: 5.018 Pesantren Peserta di 27 Kabupaten/Kota dengan 9 Bidang Usaha.



## JAWA BARAT

- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2020 tentang One Pesantren One Product.
- Program OPOP terdiri atas: Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sosiopreneur.
- Target: 1 juta santri wirausaha (Santripreneur), 1.000 pesantren wirausaha (Pesantrenpreneur) dan 1.000 Sosiopreneur alumni pesantren di akhir tahun 2023



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran melaksanakan kajian implementasi OPOP di Jawa Barat, dengan kesimpulan sbb:**



Pemberian apresiasi program *One Pesantren One Product* (OPOP) memberikan akselarasi dalam pengembangan usaha pesantren, seperti: kenaikan omzet dan kapasitas produksi, kepemilikan strategi bisnis, perubahan komposisi SDM pada usaha pesantren, dan bentuk usaha pesantren.



Program OPOP juga berdampak pada indikator makroekonomi. Pemberian Program OPOP dapat mendorong perekonomian (Laju Pertumbuhan Ekonomi). Program ini juga dapat menurunkan kemiskinan serta tingkat pengangguran.



Program OPOP juga mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).





## Percepatan Implementasi OPOP di Provinsi lain, terutama Provinsi yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)



Pengembangan OPOP melalui: Inkubasi dan Peningkatan Kapasitas (*Santripreneur, Pesantrenpreneur, Peraturan Pendukung*); Sertifikasi Halal; Pembiayaan / Pendanaan, Pemasaran & Logistik, dan Digitalisasi.



Fasilitasi dukungan untuk alternatif teknologi, kreativitas dan inovasi.



Fasilitasi kerjasama dengan KDEKS untuk akselerasi implementasi OPOP di daerah masing-masing



Fasilitasi penerbitan Saham / Sukuk melalui *Securities Crowdfunding Syariah* bagi UKM pelaksana OPOP di Pesantren.



Fasilitasi dukungan inovasi dan layanan keuangan syariah seperti Sukuk Daerah bagi Pengembangan OPOP.



Pengembangan Layanan Keuangan Syariah Berbasis Pesantren dan Komunitas

## Urgensi Inklusi Keuangan Syariah

1.

Inklusi keuangan: **ikhtiar peningkatan kesejahteraan** memerlukan kehadiran layanan keuangan yang tepat.

2.

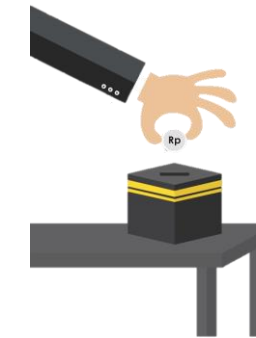
Inklusi keuangan syariah masih rendah. Sebagian penyebab utamanya adalah masih **minimnya jaringan** layanan keuangan syariah dan **rendahnya literasi keuangan syariah**.

3.

Perlu melibatkan Pesantren dan Lembaga Komunitas untuk memperluas jaringan layanan keuangan syariah → gerakan Pesantren dan Lembaga Komunitas “**naik kelas**”.



Pembiayaan



Menabung

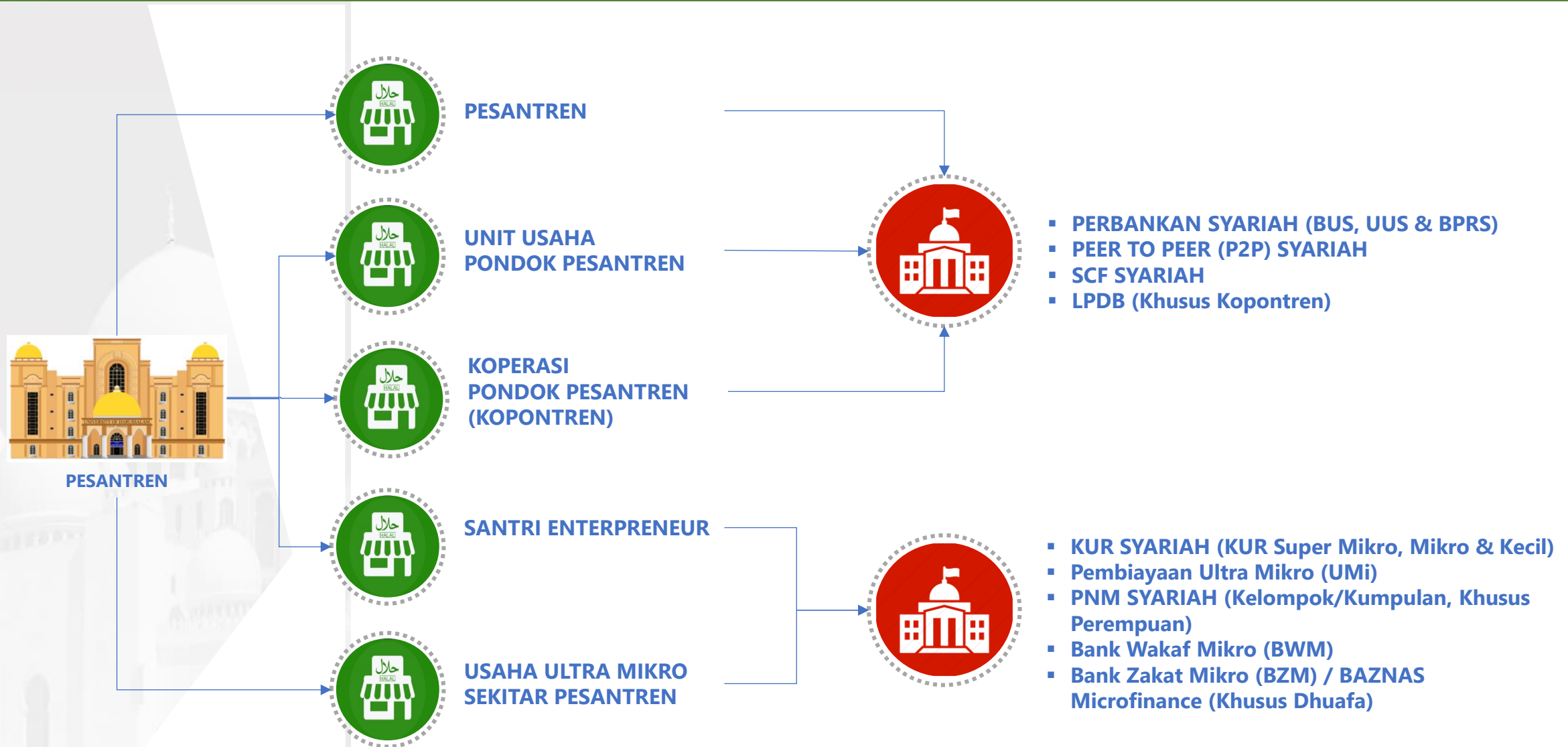


Transaksi  
lainnya

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)).



# Akses Pembiayaan/Pendanaan Syariah Pada Usaha Berbasis Pesantren



## 3 Purwarupa Platform Digital Business Matching

## Konsolidasi Kontribusi Pembiayaan/Pendanaan Syariah bagi UMKM Per Maret 2024

IDX Papan Akselerasi Jan-Mar'24	126
SCF Syariah - Mar'24	521
Fintech Syariah - Mar'24	1.002
LKMS - Des'23	277
PP Syariah - Mar'24	4.281
MV Syariah - Mar'24	2.848
Pergadaian - Mar'24	4.699
PNM - Mar'24	33.748
BUS, USS & BPRS - Mar'24	<b>107.112</b>
LPDB Syariah - Mar'24	78
KUR Syariah - Jan-Mar'24	5.410
UMi Syariah - Jan-Mar'24	935
BAZNAS Jan-Mei'24	32

**Outstanding Pembiayaan/Pendanaan Syariah Bagi UMKM (Rp, Milliar)**



\*)Periode Maret 2024

**Rasio Pembiayaan Bank Syariah (BUS, UUS & BPRS) untuk UMKM**



Sumber Data: OJK, BAZNAS, Kemenkeu, LPDB, IDX, ALUDI)

## Penerbitan Saham/Sukuk UMKM Melalui SCF Syariah Per Maret 2024



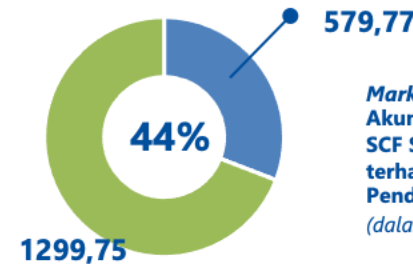
Saham **12,81 M**  
Sukuk **579,77 M**



**278** UKM  
Penerbit



\*)Periode Juni 2024



**Market Share Akumulasi Pendanaan SCF Syariah terhadap Total Pendanaan SCF (dalam Rp, miliar)**

Sumber Data: Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI)

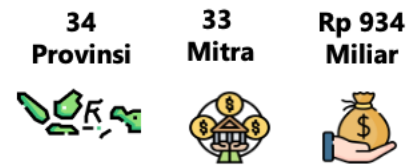
## Penyaluran Pembiayaan Syariah kepada Koperasi Syariah

### LPDB-KUMKM



\*) Periode Q1 2024

### Pusat Investasi Pemerintah (PIP)



\*)Periode Q1 2024

## Output Penyelenggaraan Kegiatan Workshop dan Business Matching Pembiayaan Syariah



**EPIKS** : (dalam persiapan)  
**FEBIS** : (dalam persiapan)  
**SAKINAH** : (dalam persiapan)



**SME EPIC** : **150 UKM** mengikuti Workshop Pembiayaan Syariah  
**SME IPO** : **300 UKM** mengikuti Forum Pasar Modal di Surabaya  
**BISLAF** : **20 UKM** Pitching



**FeSyar Jawa** : (dalam persiapan)  
**ISEF** : (dalam persiapan)



**ICEFF** : **50 UMKM** mendaftar  
**FIFTY** : (dalam masa pelaksanaan)  
**KREATIPO** : (dalam persiapan)

Anggota KNEKS

**KNEKS**  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

- Sinergi & Kolaborasi Lintas K/L dan *Stakeholder* terkait lainnya
- Dukungan Pelaksanaan Kegiatan
- Monitoring dan Evaluasi

 **BANK INDONESIA**  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

- a. IKRA (all year)
- b. Bulan Pembiayaan Syariah, FESyar (Rangkaian ISEF)
  - (Kick Off BPS (25 Juni))
  - FeSyar Surabaya (13-15 Sept)
  - ISEF Main Agenda (30 Okt – 3 Nov)

 **OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN**

- a. Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) (Maret-Oktober)
- b. Program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) (Maret-Oktober)
- c. Forum Edukasi dan Temu Bisnis untuk UMKM (FEBIS) (Maret-Oktober)



- a. **Islamic Creative Economy Founders Found – ICEFF (Bootcamp Bandung (22-25 Juli))**, Bootcamp Yogyakarta (Agustus)
- b. Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) (12 Kota; 8-9 Kota Kolaborasi OJK (Mar-Sep'24))
- c. Fintech Financing for Tourism and Creative Economy - FIFTY (Bandung Demoday, 11-12 Sept)
- d. KreatIPO (Mei-Des'24)
- e. Literasi Keuangan Bekasi (23-25 April), Magelang (29 April-1 Mei) Denpasar (29 April-1 Mei), Blitar (7-9 Mei), Toba (15-17 Mei), Tanjung Pinang (21-23 Mei)

 **KEMEN  
KOPUKM**

- a. Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) (12 Kota; 8-9 Kota Kolaborasi OJK (**Mar-Sep'24**))
- b. Fintech Financing for Tourism and Creative Economy - FIFTY (Bandung Demoday, 11-12 Sept)
- c. KreatIPO (Mei-Des'24)
- d. Literasi Keuangan

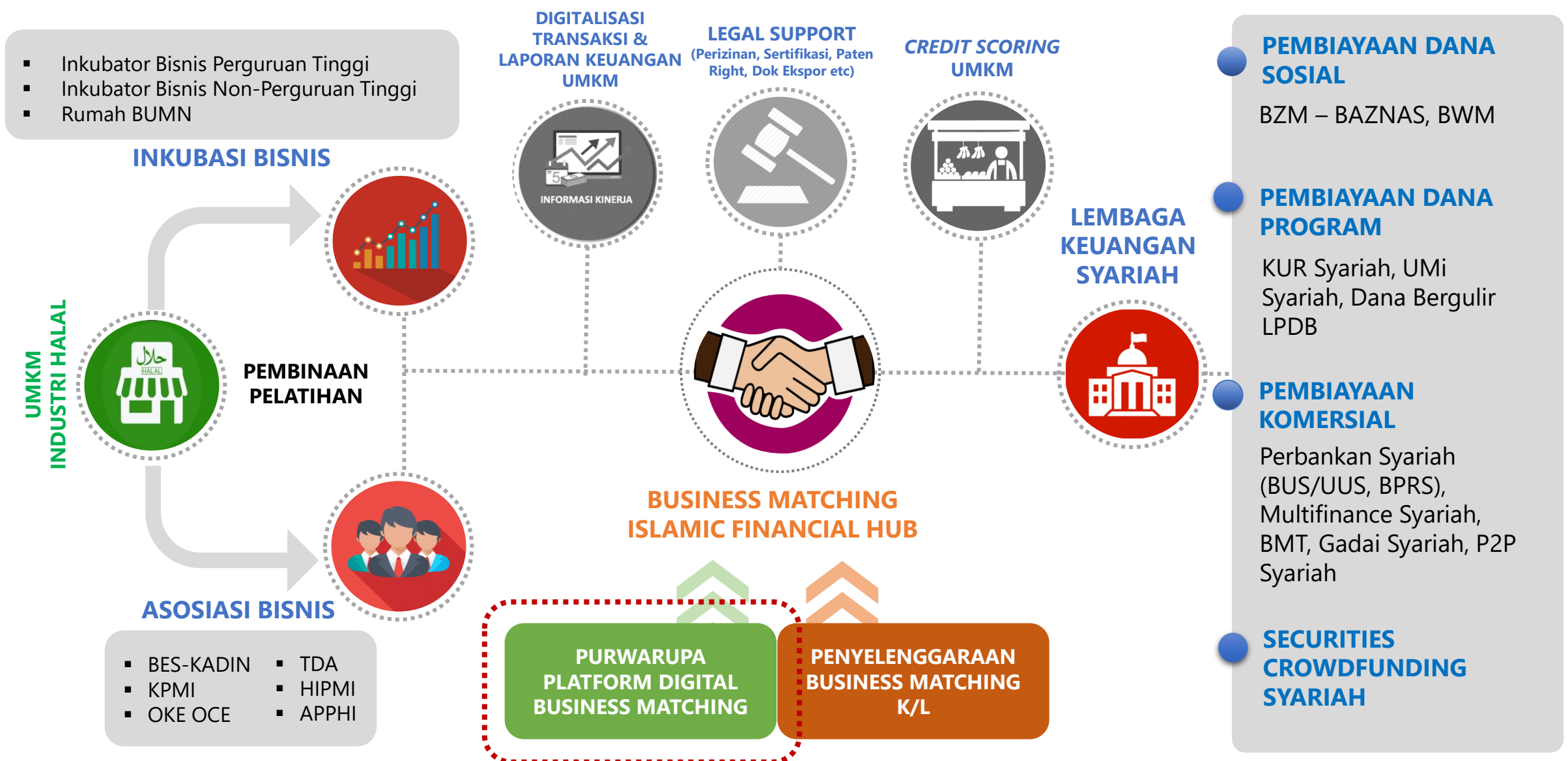


# Business Matching Islamic Financial Hub Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi



Ekonomi  
Syariah

**KNEKS**  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah





Platform membantu meningkatkan **probabilitas** keberhasilan business matching dengan mencocokkan kondisi & kebutuhan UMKM dengan kriteria/persyaratan pembiayaan dari IJKS

## KNEKS

- Meningkatkan **probabilitas keberhasilan** *business matching* pembiayaan UMKM oleh IJKS
- Sarana monitoring & evaluasi keterjangkauan akses pembiayaan/ pendanaan UMKM;
- Database UMKM



## UMKM

- Mendapatkan rekomendasi mitra **Institusi Jasa Keuangan Syariah** yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnis UMKM.
- Memudahkan pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan/ pendanaan kepada IJKS.



## USER PLATFORM *Digital Business Matching*

## Lembaga Pendamping UMKM

- Memudahkan pendampingan akses keuangan syariah bagi UMKM Binaan/Dampingan.
- Memudahkan monitoring UMKM Binaan/Dampingan dalam mendapatkan pembiayaan/ pendanaan dari IJKS.



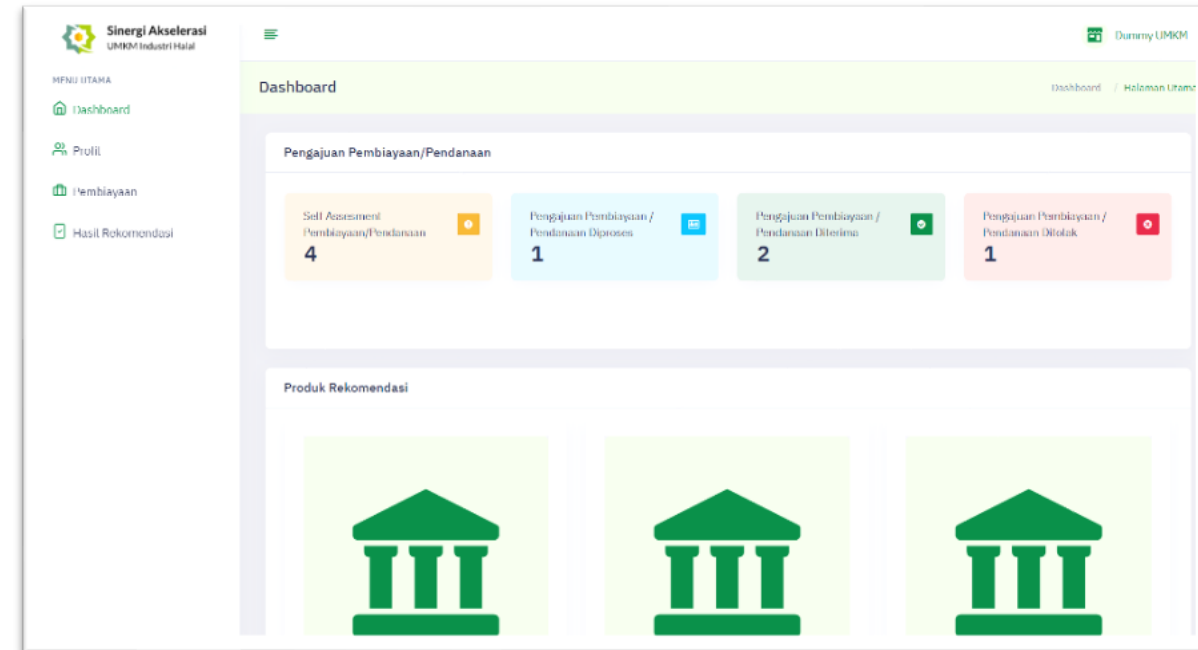
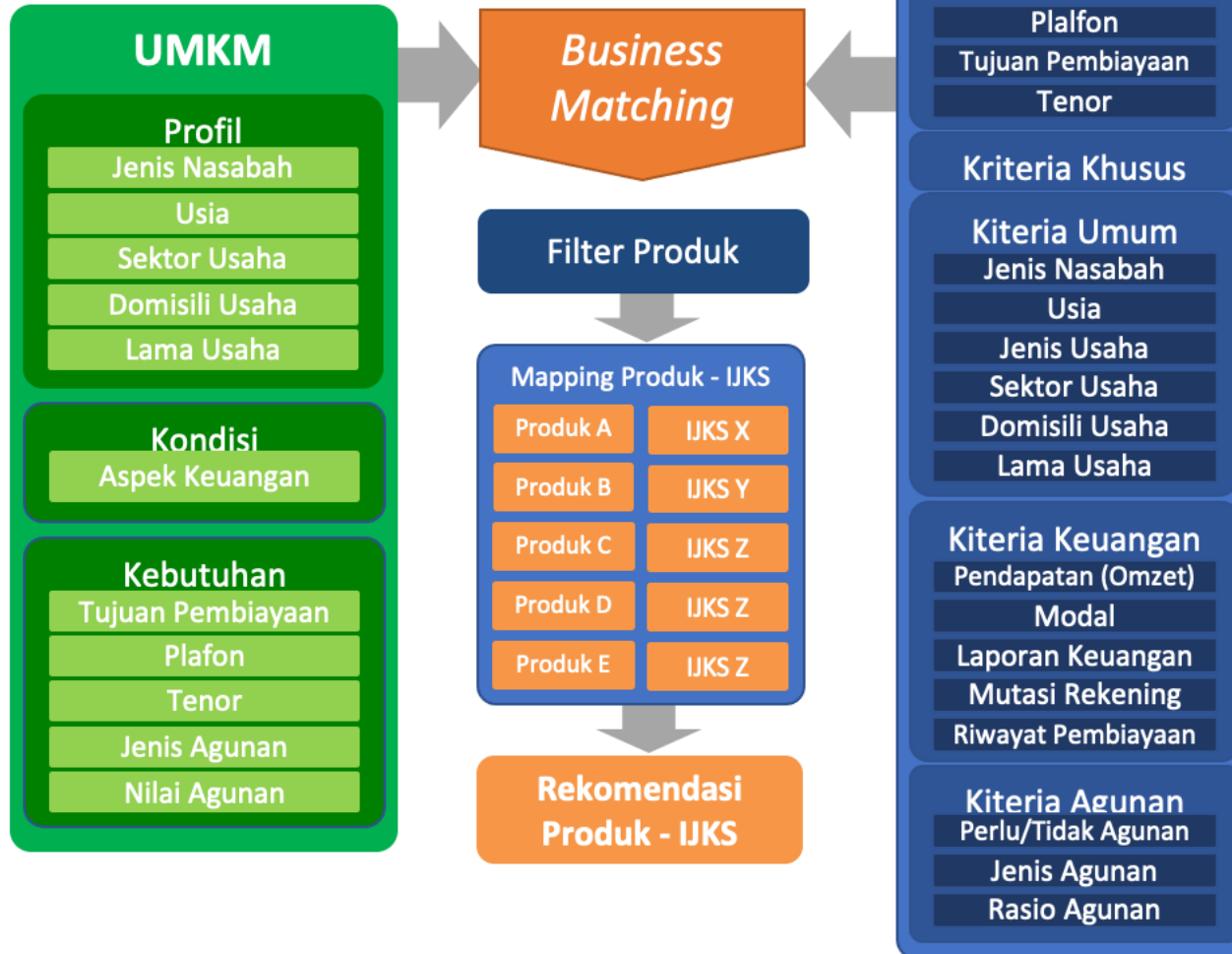
## Institusi Jasa Keuangan Syariah

- Mendapatkan rekomendasi **pelaku UMKM** yang sesuai dengan persyaratan (*eligibility criteria*) Lembaga Keuangan Syariah.
- Meningkatkan volume pembiayaan/ pendanaan kepada UMKM.



## Platform Digital Business Matching

<https://dbm.kneks.go.id/>



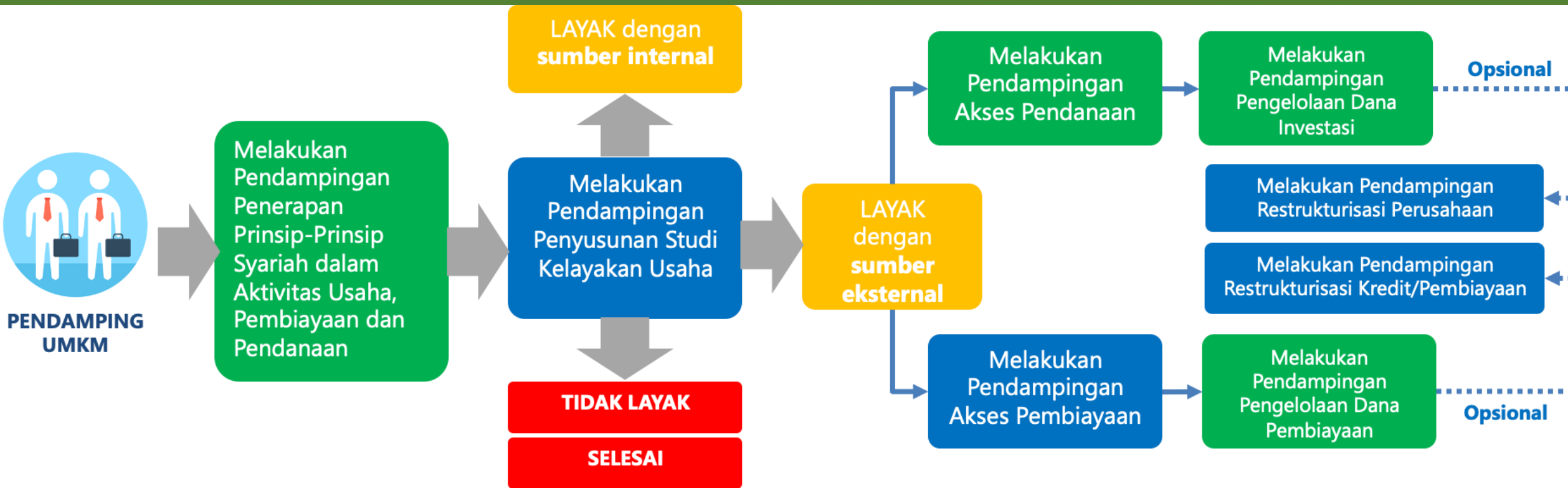
### PENGAJUAN PEMBIAYAAN

- Self Assesment Pembiayaan/Pendanaan
- Pengajuan Pembiayaan/Pendanaan **Diproses**
- Pengajuan Pembiayaan/Pendanaan **Diterima**
- Pengajuan Pembiayaan/Pendanaan **Ditolak**

### PRODUK REKOMENDASI

- Rekomendasi Kesesuaian Produk Keuangan Syariah yang disajikan dalam bentuk persentase





**Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendampingan UMKM**

berdasarkan SKKNI No. 181/2017

**Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendampingan UMKM**

(Tambahkan selain SKKNI)



## • Digital Entrepreneurship Academy •

### Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah #3

- Prinsip dan Etika Bisnis Islam pada Usaha terdigitalisasi
- Akuntansi Digital dan Fintech Syariah
- Memaksimalkan Pemasaran Digital berbasis Syariah
- Proses Pengajuan Sertifikasi Halal untuk UMKM Makanan dan Minuman

Online via zoom



### Jadwal Pendaftaran

Batas Pendaftaran

Minggu, 2 Juni 2024

Tanggal Pelatihan

Kamis, 6 Juni 2024

Jam Pelatihan

09.00 - 12.00 WIB

### Link Pendaftaran



Scan QR  
atau akses  
link dibawah:

<https://kominfo/Syariah3>

[digitalent.kominfo.go.id](https://digitalent.kominfo.go.id)

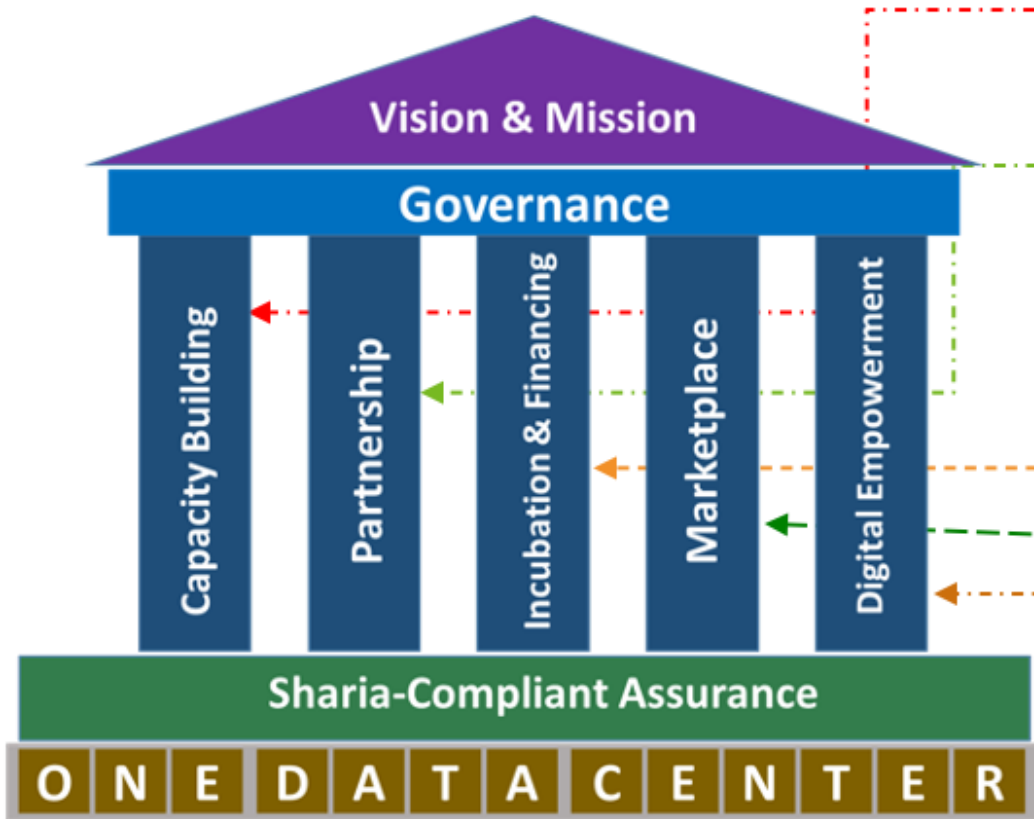
#JadiJagoanDigital





## 4 Ekosistem Bisnis Syariah berbasis Pesantren





## Data Warehouse UMKM Industri Halal

*Laporan Digital untuk mendukung kebijakan, analisa pasar, pemetaan dan lain sebagainya*

**Jaringan Inkubasi & Pusat Pelatihan**  
Titik Pusat Pembelajaran dan Pengembangan

**Tim Kerja Ekosistem UMKM Industri Halal**  
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait

**Platform Pembiayaan Terintegrasi**  
*Scoring Engine* untuk menilai kesesuaian  
Pembiayaan dan Pendanaan Syariah untuk  
setiap skala usaha

**Supplier Management System**  
*Scoring Engine* untuk menilai  
Kelayakan

**Pustaka Aplikasi Digital**  
*Rekomendasi Aplikasi yang sesuai kebutuhan  
UMKM*

**Halal Traceability**  
*Farm to Table Process Traceability*

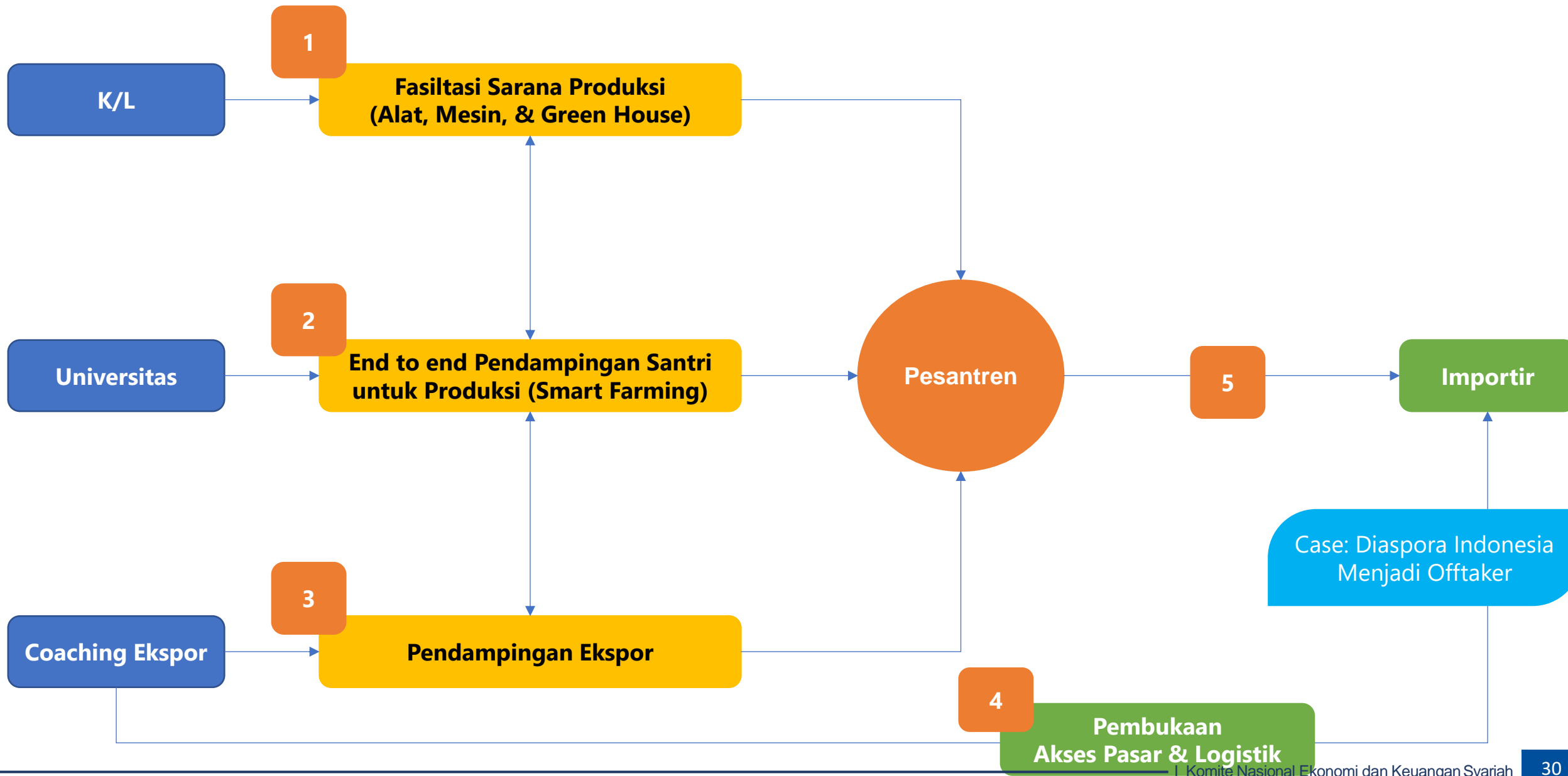
**Sharia Center of Excellent**  
*Big Data Analytics* berbasis AI





# Skema Pemberdayaan UKM Pesantren

## Case Cabai Juara Ekspor – Nudira, IPB, dan DEKS BI





“

# ZONA KHAS

Zona kuliner halal, aman dan sehat merupakan tempat dimana semua pihak terkait bekerjasama untuk menyediakan makanan dan minuman yang halal, sehat, aman, dan lingkungan nyaman sesuai dengan kaidah syariah.

”





Kantor pengelola



Memiliki Mushola atau dekat dengan sarana ibadah (Masjid)



Penyediaan air bersih



Sarana dan prasarana lainnya, seperti toilet basah, tempat cuci tangan, dan lokasi/ruangan tersendiri untuk merokok.



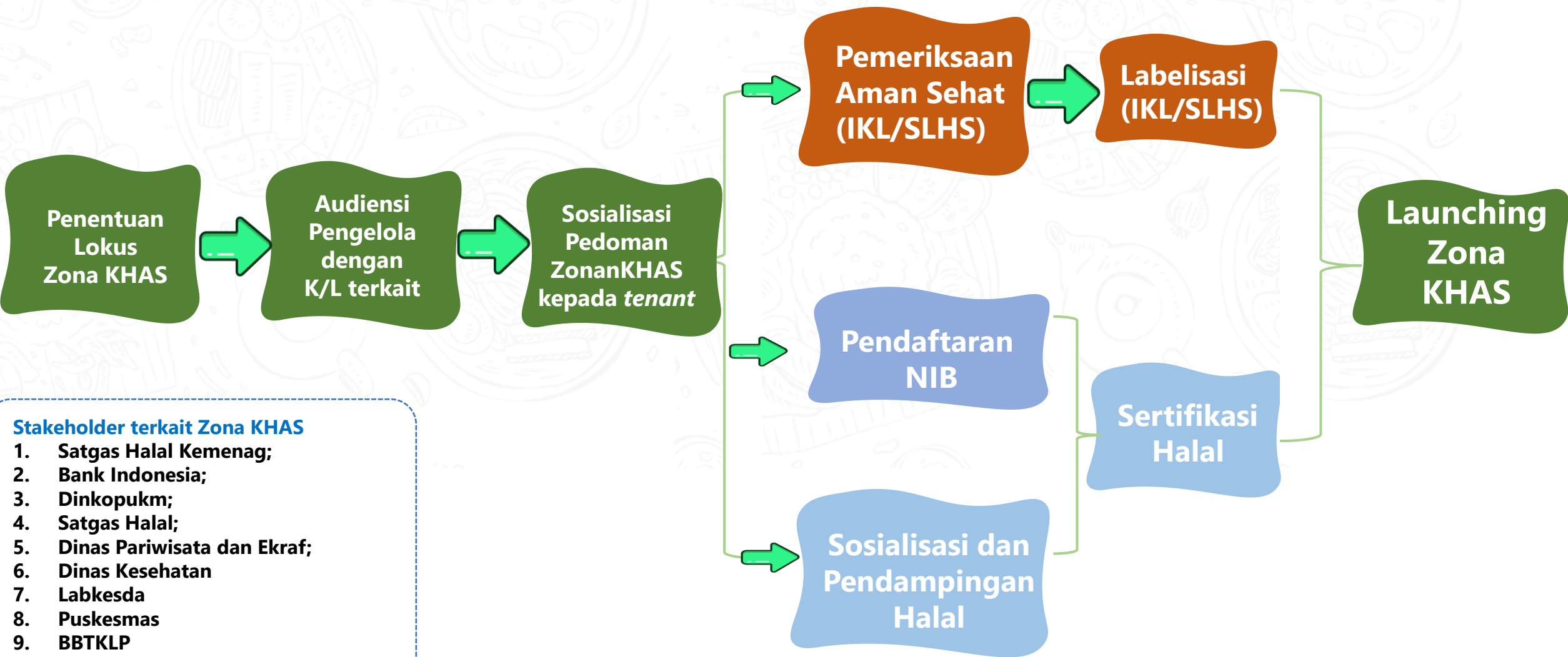
Tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian sesuai ketentuan SJPH.



Tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian sesuai persyaratan higiene sanitasi pangan.

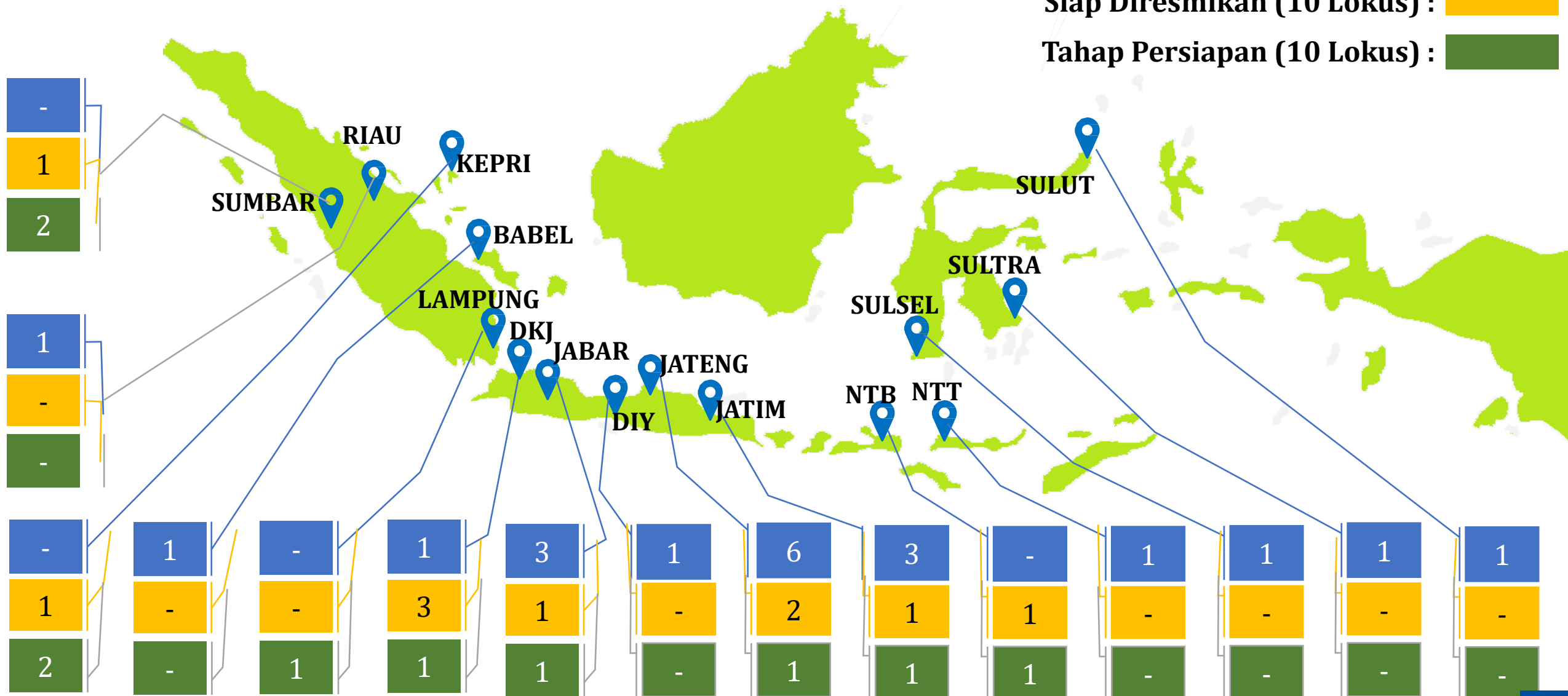


Tempat beribadah/Mushola dengan tempat Wudhu dan perlengkapan ibadahnya.



- Stakeholder terkait Zona KHAS**
1. Satgas Halal Kemenag;
  2. Bank Indonesia;
  3. Dinkopukm;
  4. Satgas Halal;
  5. Dinas Pariwisata dan Ekraf;
  6. Dinas Kesehatan
  7. Labkesda
  8. Puskesmas
  9. BBTCLP
  10. Bappeda/Bapelitbangda
  11. Dinas Perindustrian/Perdagangan
  12. Dinas terkait lainnya

**Diresmikan (20 Lokus) :** ■  
**Siap Diresmikan (10 Lokus) :** ■  
**Tahap Persiapan (10 Lokus) :** ■





# KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah


Komplek Kementerian Keuangan  
Gedung Djuanda II Lt. 17  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710

## Follow us!

 @kneks.id

 @kneks.id

 @kneks\_id

 Komite Nasional Ekonomi  
dan Keuangan Syariah

[www.kneks.go.id](http://www.kneks.go.id)

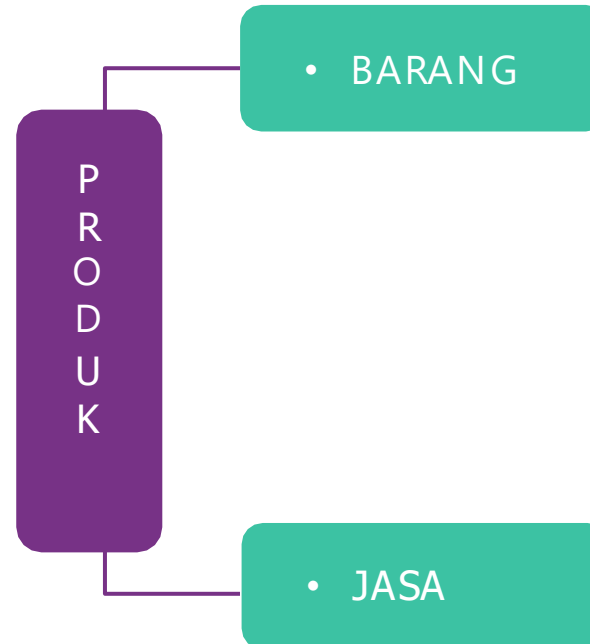


Terima Kasih



## 4 Industri Halal

- Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 jenis produk.
- Jenis produk sesuai ketentuan KMA No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.



1. Makanan
2. Minuman
3. Obat
4. Kosmetik
5. Produk Kimiawi
6. Produk Biologi
7. Produk Rekayasa Genetik
8. Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan.

1. Penyembelihan
2. Pengolahan
3. Penyimpanan
4. Pengemasan
5. Pendistribusian
6. Penjualan
7. Penyajian



## REGULER

Sertifikasi halal melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH.

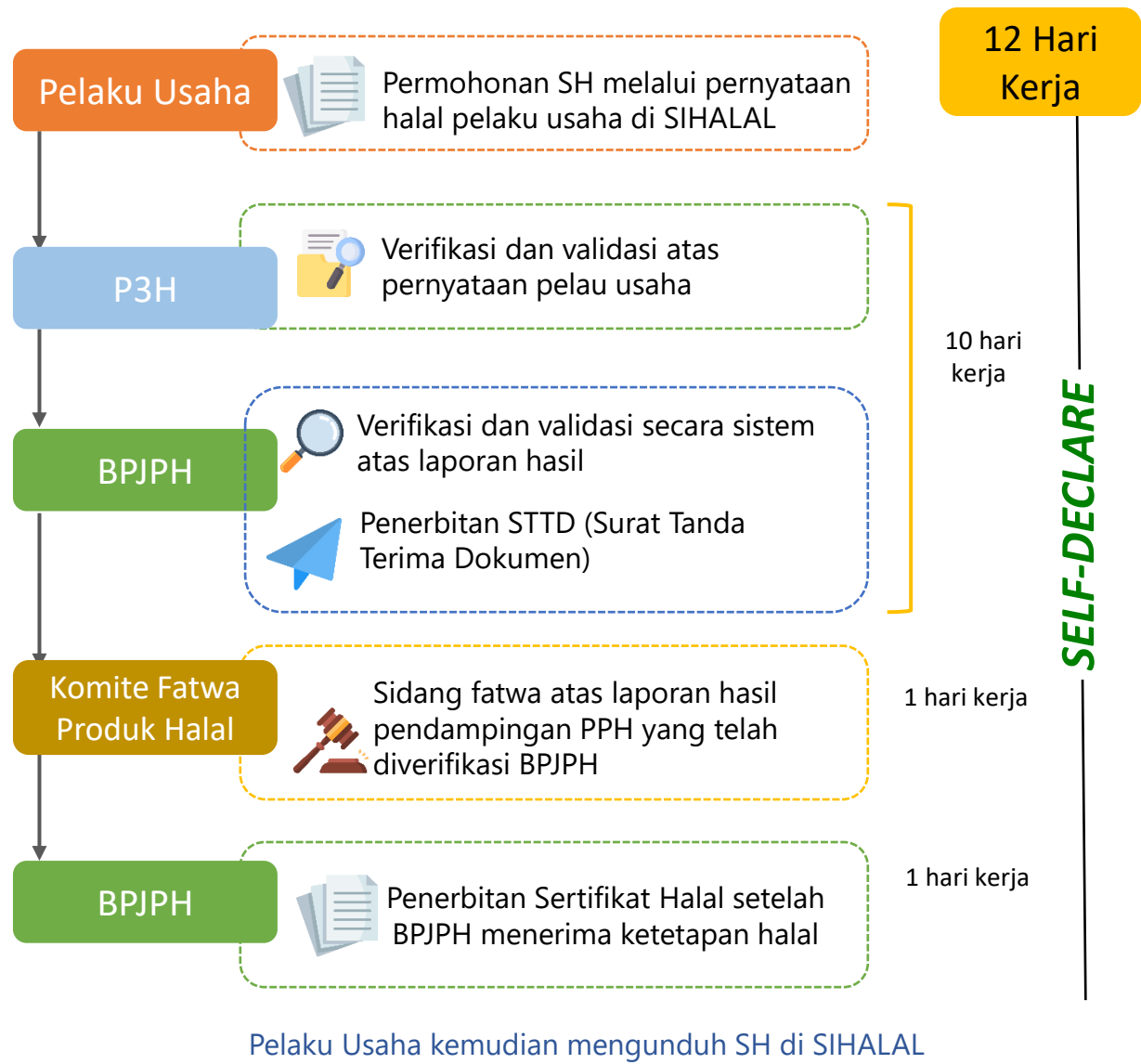
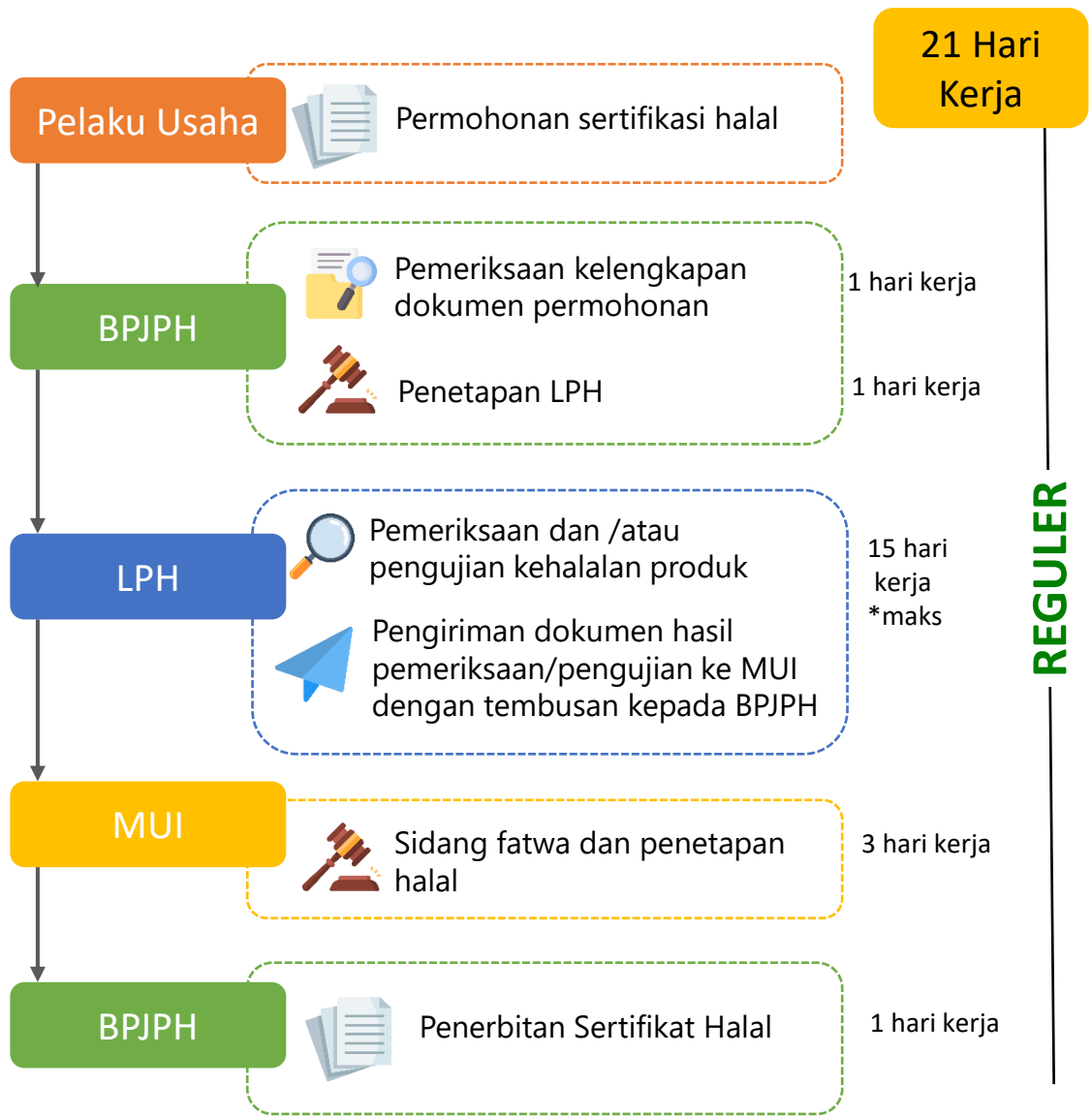
- Skala Usaha: Besar, Menengah, Kecil, Mikro
- Produk: Barang, Jasa
- Aktor Pemeriksa: Auditor Halal pada LPH
- Penetapan Halal: Komisi Fatwa MUI, Komite Fatwa Produk Halal



## SELF-DECLARE

Sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha

- Skala Usaha: Mikro, Kecil
- Produk: Barang
- Aktor Pemeriksa: Pendamping Proses Produk Halal yang teregister
- Penetapan Halal: Komite Fatwa Produk Halal





## Auditor halal



- Orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk
- Ditugaskan oleh LPH untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dan lapangan

## Juru sembelih Halal (JULEHA)



- Juru sembelih yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam
- JULEHA disertifikasi oleh MUI

## Penyelia halal



- Orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal di perusahaan
- Dapat berasal dari internal perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi



## Pendamping PPH



- Pihak yang melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk
- Pendamping dapat berasal dari instansi atau badan usaha pemerintah, perguruan tinggi, ormas dan Lembaga keagamaan Islam

# THE NEW ERA OF INDONESIAN HALAL INDUSTRY



Ekonomi  
Syariah

**KNEKS**  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



Halal Certification Proponent



Strengthening the Upstream Sector of the Halal Industry



Industrialization of Halal Products



Indonesia Halal Products Data Integration



Strengthening the Sharia Economic Sector with the Support of the Halal Industry

